

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Transparansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palembang

Yuci Putri Giranti^{1*}, Riza Wahyudi², Desi Indriasari³

^{1,2,3} Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl. Sriwijaya Negara, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.

Email: yuptr30@gmail.com^{1*}, rizawahyudi70@gmail.com², desi_indriasari@polsri.ac.id³

Histori Artikel:

Dikirim 13 Agustus 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 September 2025; Diterima 10 November 2025; Diterbitkan 1 Desember 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Giranti, Y. P., Wahyudi, R., & Indriasari, D. (2025). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Transparansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palembang. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(6), 5755-5765. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i6.5344>.

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, transparansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah perangkat daerah Kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 128 responden (Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, Pelaporan dan Bendahara). Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program "Statistic Program and Service Solution" (SPSS) versi 31. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan transparansi dan sistem pelaporan meskipun arahnya positif namun pengaruh yang dihasilkan tidak signifikan yang artinya transparansi dan sistem pelaporan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian secara simultan kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, transparansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kata Kunci: Kejelasan Sasaran Anggaran; Partisipasi Penyusunan Anggaran; Transparansi; Sistem Pelaporan; Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Abstract

This study aims to determine the effect of budget target clarity, budget participation, transparency, and reporting system on the performance accountability of the Palembang City regional government. The type of research used is quantitative research. The sample in this study uses a saturated sample method. The data collection technique was carried out by distributing questionnaires to 128 respondents (Head of Planning, Finance, Reporting, and Treasurer). Data analysis used in this study is multiple linear regression analysis using the "Statistic Program and Service Solution" (SPSS) version 31. The results of this study indicate that partially budget target clarity, budget participation have a positive and significant effect on the performance accountability of government agencies, while transparency and reporting system although in the same positive direction, the resulting effect is not significant, meaning that transparency and reporting system do not have a significant effect on the performance accountability of government agencies. The results of the study simultaneously show that budget target clarity, budget participation, transparency, and reporting system have a positive and significant effect on the performance accountability of government agencies.

Keyword: Clarity of Budget Targets; Participation in Budget Preparation; Transparency; Reporting System; Accountability of Government Agency Performance.

1. Pendahuluan

Salah satu komponen penting dalam manajemen instansi pemerintah adalah akuntabilitas kinerja, yang bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban pegawai dan pihak-pihak lain yang berkepentingan atas hasil kerja mereka. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), akuntabilitas kinerja berfungsi sebagai ukuran utama efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Untuk memastikan bahwa semua instansi pemerintah memenuhi tanggung jawabnya dalam menyusun laporan kinerja, SAKIP telah dikembangkan sebagai suatu kerangka kerja yang komprehensif yang terdiri dari sejumlah aktivitas, alat bantu, dan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Kota Palembang menunjukkan gambaran mengenai kinerja Perangkat Daerah Selama dua tahun berturut-turut 2022 dan 2023, evaluasi SAKIP terhadap 52 Perangkat Daerah Kota Palembang menunjukkan peningkatan kinerja secara keseluruhan. Pada 2022, sekitar 17,3% perangkat daerah meraih predikat A (kinerja sangat baik), 46,15% kategori BB (kinerja baik), dan 19,23% kategori B (cukup baik), dengan sekitar 15,4% berada di kategori CC dan C yang memerlukan perbaikan, serta satu perangkat daerah tidak dapat dievaluasi. Pada 2023, predikat A meningkat menjadi 19,23%, kategori BB tetap 46,15%, kategori B naik menjadi 21,15%, kategori CC stabil di 7,7%, dan kategori C menurun menjadi 3,85%, dengan satu perangkat daerah masih tidak dapat dievaluasi. Data ini mencerminkan adanya upaya perbaikan dalam pencapaian akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan. Meskipun penelitian ini menambah hasil penelitian Nurulhuda dkk. (2024) dengan melihat bagaimana keterbukaan anggaran dan keterlibatan dalam perencanaan anggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja, penelitian ini tidak menyertakan variabel yang berpengaruh positif terhadap kualitas aparatur pemerintah. Perbedaan lainnya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini meneliti setiap perangkat daerah di Pemerintah Kota Palembang, tidak hanya BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, variabel-variabel yang mempengaruhi akuntabilitas pemerintah daerah akan lebih dipahami sebagai hasil dari penelitian ini.

2. Tinjauan Pustaka

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Mahmudi, 2016). Menurut Bastian (2010), akuntabilitas kinerja di sektor publik dapat ditingkatkan melalui beberapa faktor pengungkit, di antaranya kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, transparansi, dan sistem pelaporan. Kejelasan sasaran anggaran yang tinggi memungkinkan aparatur memahami target yang harus dicapai sehingga mendorong penggunaan anggaran secara optimal dan akuntabel (Rudi, 2023; Triwahyuni dkk., 2024; Nurulhuda dkk., 2024). Partisipasi penyusunan anggaran memberikan rasa memiliki terhadap anggaran kepada seluruh pihak yang terlibat, sehingga mengurangi senjangan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas kinerja (Keli Malasari, 2023; Prasetya dkk., 2023; Mahasabha & Ratnadi, 2019). Transparansi anggaran publik memungkinkan masyarakat dan stakeholder mengawasi penggunaan keuangan negara, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas kinerja (Rengganis dkk., 2023; Rosita dkk., 2022), meskipun beberapa penelitian menunjukkan pengaruhnya belum signifikan (Yuni Shara dkk., 2020). Sistem pelaporan yang baik memberikan umpan balik tepat waktu mengenai pencapaian kinerja, sehingga memudahkan evaluasi dan perbaikan (Dewata dkk., 2020; Putri & Nugroho, 2023). Namun, beberapa peneliti menemukan bahwa sistem pelaporan belum memberikan dampak signifikan apabila kualitas data dan ketepatan waktu pelaporan masih rendah (Pratama dkk., 2019). Dengan demikian, keempat variabel tersebut secara teoretis dan empiris diyakini memiliki hubungan positif dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik secara parsial maupun simultan, meskipun tingkat signifikansinya dapat bervariasi tergantung pada konteks organisasi dan kualitas implementasinya.

3. Metode Penelitian

Penelitian kuantitatif ini melihat bagaimana instansi pemerintah Kota Palembang mempertanggungjawabkan kinerjanya terkait dengan tujuan yang jelas, keterlibatan dalam penganggaran, transparansi, dan sistem pelaporan. Seluruh perangkat daerah di Kota Palembang menjadi subjek penelitian ini, yang menghasilkan data primer. Empat orang dari setiap SKPD - kepala subbagian Perencanaan, Keuangan, Pelaporan, dan Bendahara - disurvei untuk mengumpulkan data penelitian. Sebelum melakukan regresi dan menggunakan uji R², F, dan T, kami menggunakan uji validitas dan reliabilitas untuk memeriksa asumsi standar normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Data digambarkan dengan statistik deskriptif dalam tabel berikut, yang mencakup rata-rata, standar deviasi, dan nilai tertinggi dan terendah untuk masing-masing

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

| Descriptive Statistics | | | | | |
|---|----|---------|---------|---------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Kejelasan Sasaran Anggaran | 32 | 24,00 | 40,00 | 33,8594 | 3,33598 |
| Partisipasi Penyusunan Anggaran | 32 | 16,75 | 30,00 | 23,9688 | 3,17611 |
| Transparansi | 32 | 18,00 | 25,00 | 21,3906 | 1,90916 |
| Sistem Pelaporan | 32 | 20,00 | 30,00 | 25,0391 | 2,33928 |
| Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 32 | 39,00 | 55,00 | 46,8750 | 4,62593 |
| Valid N (listwise) | 32 | | | | |

Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) dengan nilai mean 33,86 dan standar deviasi 3,34, Partisipasi Penyusunan Anggaran (X2) dengan nilai mean 23,97 dan standar deviasi 3,18, Transparansi (X3) dengan nilai mean 21,39 dan standar deviasi 1,91, Sistem Pelaporan (X4) dengan nilai mean 25,04 dan standar deviasi 2,34, serta Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dengan nilai mean 46,88 dan standar deviasi 4,63, semuanya memiliki penyebaran data yang baik karena nilai mean masing-masing variabel lebih besar daripada standar deviasinya.

4.1.2 Uji Validitas

Jika nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} , menunjukkan bahwa instrumen pernyataan tersebut sah, maka variabel penelitian dianggap valid.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

| Variabel | No. Pertanyaan | r_{hitung} | r_{tabel} | Kriteria |
|----------------------------|----------------|--------------|------------------|----------|
| | | | 5% $df=(N-2=30)$ | |
| Kejelasan Sasaran Anggaran | 1 | 0,621 | 0,3494 | Valid |
| | 2 | 0,804 | | Valid |
| | 3 | 0,762 | | Valid |

RESEARCH ARTICLE

| | | | | |
|---|----|-------|--------|-------|
| | 4 | 0,725 | | Valid |
| | 5 | 0,776 | | Valid |
| | 6 | 0,811 | | Valid |
| | 7 | 0,785 | | Valid |
| | 8 | 0,787 | | Valid |
| Partisipasi Penyusunan Anggaran | 1 | 0,872 | 0,3494 | Valid |
| | 2 | 0,866 | | Valid |
| | 3 | 0,791 | | Valid |
| | 4 | 0,875 | | Valid |
| | 5 | 0,883 | | Valid |
| | 6 | 0,820 | | Valid |
| Transparansi | 1 | 0,752 | 0,3494 | Valid |
| | 2 | 0,906 | | Valid |
| | 3 | 0,914 | | Valid |
| | 4 | 0,892 | | Valid |
| | 5 | 0,786 | | Valid |
| Sistem Pelaporan | 1 | 0,809 | 0,3494 | Valid |
| | 2 | 0,806 | | Valid |
| | 3 | 0,888 | | Valid |
| | 4 | 0,852 | | Valid |
| | 5 | 0,833 | | Valid |
| | 6 | 0,546 | | Valid |
| Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 1 | 0,779 | 0,3494 | Valid |
| | 2 | 0,849 | | Valid |
| | 3 | 0,750 | | Valid |
| | 4 | 0,461 | | Valid |
| | 5 | 0,787 | | Valid |
| | 6 | 0,882 | | Valid |
| | 7 | 0,872 | | Valid |
| | 8 | 0,889 | | Valid |
| | 9 | 0,849 | | Valid |
| | 10 | 0,820 | | Valid |
| | 11 | 0,860 | | Valid |

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner untuk variabel kejelasan sasaran anggaran (X1), partisipasi penyusunan anggaran (X2), transparansi (X3), sistem pelaporan (X4), dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) dinyatakan valid karena nilai *r* hitung setiap pertanyaan lebih besar dari *r* tabel (0,3494) pada tingkat signifikansi 0,05, sehingga seluruh pernyataan dapat mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini dengan baik.

4.1.3 Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dikatakan reliabel apabila nilai *cronbach' alpha* lebih dari 0.60 sehingga instrumen pernyataan tersebut dapat dinyatakan valid.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Nilai Cronbach' Alpha | N of Items | Keterangan |
|---|-----------------------|------------|------------|
| Kejelasan Sasaran Anggaran | 0,891 | 8 | Reliabel |
| Partisipasi Penyusunan Anggaran | 0,924 | 6 | Reliabel |
| Transparansi | 0,899 | 5 | Reliabel |
| Sistem Pelaporan | 0,880 | 6 | Reliabel |
| Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 0,938 | 11 | Reliabel |

RESEARCH ARTICLE

Hasil pengujian reliabilitas memperlihatkan bahwa seluruh item dalam kuesioner, yang mencakup variabel kejelasan tujuan anggaran (X1), keterlibatan dalam penyusunan anggaran (X2), tingkat keterbukaan (X3), mekanisme pelaporan (X4), serta akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah (Y), terbukti dapat dipercaya. Hal ini ditandai dengan nilai Cronbach's alpha yang melebihi ambang batas 0,60, sehingga semua pertanyaan yang diajukan mampu secara efektif mengukur variabel-variabel yang diteliti.

4.1.4 Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dikatakan terdistribusi normal jika nilai *Asymp Sig (2 tailed)* hasil perhitungan *kolmogorov-Smirnov* $\geq 0,05$ sehingga data tersebut dapat dinyatakan normal.

Tabel 4. Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual | |
|--|-------------------------|-------------------------|------|
| N | | 32 | |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 | |
| | Std. Deviation | 2,00971304 | |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,098 | |
| | Positive | ,062 | |
| | Negative | -,098 | |
| Test Statistic | | ,098 | |
| Asymp. Sig. (2-tailed) ^c | | ,200 ^d | |
| Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e | Sig. | ,593 | |
| | 99% Confidence Interval | Lower Bound | ,580 |
| | | Upper Bound | ,606 |

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.
 e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Pengujian One Sample Kolmogorov-Smirnov mengindikasikan bahwa nilai signifikansi berada di atas 0,05, yang berarti residual sudah tersebar dengan pola normal.

4.1.5 Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dapat dinyatakan hasil model regresi yang baik apabila pengujian tidak terjadi multikolinieritas dengan nilai *tolerance* $> 0,100$ dan *VIF* < 10 .

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

| Model | Coefficients ^a | | | | Sig. | Collinearity Statistics | |
|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | | Tolerance | VIF |
| | B | Std. Error | Beta | | | | |
| 1 (Constant) | 42.372 | 448.310 | | ,095 | | | ,925 |
| Kejelasan Sasaran Anggaran | ,505 | ,213 | ,364 | 2,374 | ,025 | ,297 | 3,362 |

RESEARCH ARTICLE

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------|------|------|-------|------|------|-------|
| Partisipasi Penyusunan Anggaran | ,501 | ,146 | ,344 | 3,422 | ,002 | ,692 | 1,445 |
| Transparansi Sistem Pelaporan | ,562 | ,477 | ,232 | 1,179 | ,249 | ,181 | 5,533 |
| | ,213 | ,404 | ,108 | ,529 | ,601 | ,168 | 5,962 |

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* keempat variabel > 0.100 dan nilai VIF < 10 sehingga dinyatakan tidak terjadi model regresi dalam penelitian.

4.1.6 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas dapat dinyatakan nilai yang signifikan apabila pengujian tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi apabila nilai > 0,05 sebaliknya pengujian terjadi gejala heteroskedastisitas apabila nilai < 0.05.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Model | Coefficients ^a | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 1,424 | 2,618 | | ,544 | ,591 |
| Kejelasan Sasaran Anggaran | -,010 | ,124 | -,026 | -,079 | ,937 |
| Partisipasi Penyusunan Anggaran | ,154 | ,085 | ,381 | 1,801 | ,083 |
| Transparansi | ,265 | ,278 | ,395 | ,953 | ,349 |
| Sistem Pelaporan | -,357 | ,236 | -,651 | -1,513 | ,142 |

a. Dependent Variable: ABS_RES

Persamaan regresi $Y=0,424 + 0,505X_1 + 0,501X_2 + 0,562X_3 + 0,213X_4 + e$ menunjukkan bahwa:

- 1) Konstanta (42.372) mengindikasikan nilai dasar akuntabilitas jika semua variabel independen diabaikan.
- 2) Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1 : 0.505), Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_2 : 0.501), dan Transparansi (X_3 : 0.562) berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas, dengan transparansi memiliki koefisien tertinggi.
- 3) Sistem Pelaporan (X_4 : 0.213) juga berpengaruh positif, meskipun lebih rendah. Secara keseluruhan, peningkatan pada setiap variabel akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Palembang.

4.1.7 Uji koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) berkisar antara 0 hingga 1, yang menunjukkan sejauh mana variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 rendah menunjukkan keterbatasan penjelasan, sedangkan nilai mendekati 1 menunjukkan hampir seluruh variasi dependen dapat diprediksi oleh variabel independent.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,901 ^a | ,811 | ,783 | 2,15344 |

RESEARCH ARTICLE

Kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, transparansi, dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 78,3% berdasarkan pengujian koefisien determinasi, sedangkan sisanya sebesar 21,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Nilai adjusted R Square untuk hubungan ini adalah 0,783.

4.1.8 Uji t (Uji Parsial)

Pada uji parsial hipotesis diterima jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$. Berdasarkan perhitungan ($df = n - k - 1 = 27$), diperoleh $t\text{-tabel}$ sebesar 1,703 pada tingkat signifikansi 0,05.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

| | | Coefficients ^a | | | t | Sig. |
|-------|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 42.372 | 448.310 | | ,095 | ,925 |
| | Kejelasan Sasaran Anggaran | ,505 | ,213 | ,364 | 2,374 | ,025 |
| | Partisipasi Penyusunan anggaran | ,501 | ,146 | ,344 | 3,422 | ,002 |
| | Transparansi | ,562 | ,477 | ,232 | 1,179 | ,249 |
| | Sistem Pelaporan | ,213 | ,404 | ,108 | ,529 | ,601 |

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pengujian hipotesis parsial (Uji t) menunjukkan bahwa:

- 1) Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ($t\text{-hitung} = 2,374 > t\text{-tabel} = 1,703$; $p\text{-value} = 0,025 < 0,05$).
- 2) Partisipasi Penyusunan Anggaran juga berpengaruh positif dan signifikan ($t\text{-hitung} = 3,422 > t\text{-tabel}$; $p\text{-value} = 0,002 < 0,05$).
- 3) Transparansi tidak berpengaruh signifikan ($t\text{-hitung} = 1,179 < t\text{-tabel}$; $p\text{-value} = 0,249 > 0,05$).
- 4) Sistem Pelaporan tidak berpengaruh signifikan ($t\text{-hitung} = 0,529 < t\text{-tabel}$; $p\text{-value} = 0,601 > 0,05$).

Meskipun Transparansi dan Sistem Pelaporan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap model, dua variabel - Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran - terbukti mendorong akuntabilitas kinerja.

4.1.9 Uji F (Uji Simultan)

Pengujian simultan dikatakan hipotesis dapat diterima atau mempengaruhi variable apabila nilai $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ dengan mengetahui hasil tingkat signifikansi 0,05 dengan $df (N1) = k-1$ atau $5-1=4$, dan $df (N2) = n-k$ atau $32-5 = 27$.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

| | | ANOVA ^a | | | | Sig. |
|-------|------------|--------------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | |
| 1 | Regression | 538,168 | 4 | 134,542 | 29,013 | ,001 ^b |
| | Residual | 125,207 | 27 | 4,637 | | |
| | Total | 663,375 | 31 | | | |

a. Dependent Variable: akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Nilai $F\text{-hitung}$ sebesar 29,013 (lebih tinggi dari $F\text{-tabel}$ sebesar 2,97) dan tingkat signifikansi sebesar 0,001 ($< 0,05$) pada hasil uji F menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipengaruhi secara signifikan oleh kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, transparansi, dan

RESEARCH ARTICLE

sistem pelaporan secara bersama-sama. Meskipun hanya dua faktor yang ditemukan signifikan secara statistik pada studi awal, pengujian ini memberikan lebih banyak bukti bahwa semua variabel model berpengaruh secara signifikan.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di perangkat daerah Kota Palembang dipengaruhi secara signifikan oleh beberapa faktor anggaran berbasis kinerja. Pertama, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, terbukti dari nilai t -hitung $2,374 > t$ -tabel $1,703$ dengan signifikansi $0,025 < 0,05$. Kejelasan sasaran yang didukung sistem informasi memadai, penganggaran yang transparan, serta pemisahan fungsi pengendali dan pengguna anggaran membuat anggaran dapat digunakan secara optimal sehingga target kinerja tercapai. Temuan ini sejalan dengan Nurulhuda dkk. (2024), Triwahyuni dkk. (2024), dan Harianto dkk. (2021), tetapi berlawanan dengan Pratama dkk. (2019). Kedua, partisipasi penyusunan anggaran juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, ditunjukkan oleh t -hitung $3,422 > t$ -tabel $2,703$ dan signifikansi $0,002 < 0,05$. Partisipasi aktif aparatur pemerintah dalam proses penyusunan anggaran meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan riil, mengoptimalkan sumber daya, serta memperkuat transparansi dan efektivitas kinerja. Hasil ini konsisten dengan penelitian Keli Malasari (2023), namun bertentangan dengan Alfitriady dkk. (2020) yang tidak menemukan pengaruh signifikan. Sebaliknya, transparansi dan sistem pelaporan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Untuk transparansi, nilai t -hitung $1,179 < t$ -tabel $1,703$ dan signifikansi $0,249 > 0,05$ menunjukkan bahwa meskipun arahnya positif, keterbukaan informasi dan publikasi laporan keuangan di Kota Palembang belum memberikan dampak nyata, kemungkinan karena akses informasi yang masih terbatas. Temuan ini mendukung Yuni Shara dkk. (2020), tetapi berbeda dengan Rengganis dkk. (2023). Demikian pula, sistem pelaporan menunjukkan t -hitung $0,529 < t$ -tabel $1,703$ dan signifikansi $0,601 > 0,05$, sehingga tidak signifikan. Hal ini diduga disebabkan oleh kualitas data yang rendah, keterlambatan pelaporan, dan minimnya tindak lanjut. Hasil ini berlawanan dengan Nurulhuda dkk. (2024), tetapi searah dengan Putri dan Nugroho (2023). Namun, ketika keempat variabel—kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, transparansi, dan sistem pelaporan—diuji secara simultan melalui uji F , terdapat pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai F -hitung $29,013 > F$ -tabel $2,97$ dengan signifikansi $0,001 < 0,05$ membuktikan bahwa secara bersama-sama keempat faktor tersebut mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja secara signifikan. Kejelasan sasaran memberikan arah perencanaan yang tepat, partisipasi menjamin kesesuaian dengan kebutuhan riil, transparansi membangun kepercayaan publik, dan sistem pelaporan yang baik memungkinkan evaluasi serta perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun transparansi dan sistem pelaporan belum optimal jika berdiri sendiri, kombinasi keempat elemen ini terbukti menjadi kunci utama dalam memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Palembang.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa perencanaan anggaran yang terorganisir dan terarah memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan organisasi pemerintah, khususnya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi di perangkat daerah Kota Palembang. Secara khusus, kejelasan sasaran anggaran terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, karena memastikan bahwa anggaran dialokasikan secara tepat sasaran, didukung oleh sistem informasi yang memadai dan pemisahan fungsi pengendali serta pengguna anggaran, sehingga target kinerja dapat tercapai secara optimal. Selain itu, partisipasi aktif aparatur dalam proses penyusunan anggaran juga menunjukkan dampak positif dan signifikan, yang tidak hanya meningkatkan kualitas anggaran melalui pemahaman mendalam terhadap kebutuhan riil, tetapi juga memperkuat transparansi serta efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya. Namun, transparansi secara parsial tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan akses

RESEARCH ARTICLE

informasi publik dan kurang optimalnya publikasi laporan keuangan, meskipun arah pengaruhnya tetap positif. Demikian pula, sistem pelaporan gagal menunjukkan efek signifikan, yang diduga akibat kualitas data yang rendah, keterlambatan dalam proses pelaporan, serta minimnya tindak lanjut atas temuan pelaporan, sehingga sistem tersebut belum mampu mendorong tanggung jawab kinerja yang lebih besar. Meskipun demikian, ketika keempat faktor—yaitu kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, transparansi, dan sistem pelaporan—dilihat secara simultan, mereka secara keseluruhan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa, walaupun tidak semua komponen berpengaruh secara terpisah, kombinasi keempat elemen tersebut secara kolektif mampu memperkuat akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah Kota Palembang, dengan menyediakan fondasi perencanaan yang terarah, kesesuaian kebutuhan, kepercayaan publik, serta mekanisme evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, rekomendasi utama adalah bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan integrasi antar-faktor ini guna mencapai tata kelola anggaran yang lebih akuntabel dan efektif.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyukseskan penelitian ini, terutama kepada mereka yang telah memberikan informasi dan data yang sangat penting.

7. Referensi

- Anggita, D., & Kartikasari, R. (2023). Pengaruh kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas publik terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 16(1), 1–12. <https://doi.org/10.31001/jbk.v16i1.2017>.
- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal dan sistem pelaporan di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 150–159. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i2.454>.
- Astono, A. (2021). Partisipasi penyusunan anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(3), 390–410.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik*. Erlangga.
- BPPK. (2008). *Pengukuran kinerja: Suatu tinjauan pada instansi pemerintah*.
- Dewata, E., Sari, Y., Jauhari, H., & Lestari, T. D. (2020). Ketaatan pada peraturan perundangan, sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 541–550.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 27* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Julia, R. L., Sandrayati, S., & Nurhasanah, N. (2023). Unsur-unsur yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 211–218.

RESEARCH ARTICLE

Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang (2023).

Mahasabha, N. L. A., & Ratnadi, N. M. D. (2019). Pengaruh partisipasi penganggaran dan penekanan anggaran pada senjangan anggaran dengan locus of control sebagai pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2123–2154. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p17>.

Mahmudi. (2016). *Akuntansi sektor publik* (Edisi revisi). UII Press.

Mulyadi, M. (2022). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan budaya organisasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmiah*, 6(2), 2494–2501.

Nurulhuda, S., Sari, D., & Wahyuni, R. (2024). Unsur-unsur yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 45–60.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Prasetya, R. A., Suparwati, Y. K., & Kristanto, R. S. (2023). Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan). *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*.

Pratama, B., Nugroho, A., & Hidayat, T. (2019). Sistem pelaporan dan tanggung jawab bawahan kepada atasan dalam instansi pemerintah. *Jurnal Tata Kelola Publik*, 8(2), 120–130.

Putri, A. R., & Nugroho, B. S. (2023). Pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di era digital. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 12(1), 45–58.

Rengganis, F., Sari, L., & Prasetyo, A. (2023). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, transparansi, dan kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 10(4), 221–235.

Rosita, W., Haryono, F., & Yulianti, L. (2022). Pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 9(1), 33–49.

Rudi, M. (2023). Kejelasan sasaran anggaran dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 78–89.

Sugiarto. (2017). *Metodologi penelitian bisnis* (Y. Yeskha, Ed.). Andi.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (1st ed.). Alfabeta.

RESEARCH ARTICLE

- Tome, S., Yamin Noch, M., Pasolo, F., & Sonjaya, Y. (2023). Pengaruh kompetensi aparatur, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 217–237.
- Wicaksono, E. (2022). Kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja aparatur sipil negara dalam mendukung pembangunan dan pengembangan Kota Probolinggo. *Journal on Education*, 4(4), 1731–1741.
- Yuni Shara, Y., dkk. (2020). Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran di RSUD Djoelham Binjai. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Daerah*, 7(2), 150–160.